

NASIONALISME DAN MILITERISME: IDEOLOGISASI HISTORIOGRAFI BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH SMA

Agus Mulyana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
agus_mulyana_upi@yahoo.com

ABSTRACT

The Indonesian National History Lesson textbook for Senior High School is one of the works of historiography aimed for educational purposes. History as an educational tool will be influenced by the goal of education, especially the goal of history lesson, set out in the curriculum. Political base is one of the important bases in designing curriculum. The political base meant is the governmental political policy. The preparation of history materials in the Indonesian National History textbooks can not be separated from the influence of governmental political policy. One of the effects on the textbook is the existence of ideologization. The forms of ideologization that exist in the historiography of the Indonesian National History textbooks, among others, are nationalism and militarism.

Keywords: historiography, textbook, nationalism, militarism

ABSTRAK

Buku teks Pelajaran Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA merupakan salah satu karya historiografi yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan. Sejarah sebagai alat pendidikan akan dipengaruhi oleh tujuan pendidikan khususnya tujuan mata pelajaran sejarah yang tertuang dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum memiliki salah satu landasan penting yaitu landasan politik. Landasan politik yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah. Penyusunan materi sejarah dalam buku teks Sejarah Nasional Indonesia tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik pemerintah. Salah satu pengaruh terhadap buku teks tersebut adalah adanya ideologisasi. Bentuk ideologisasi yang ada dalam historiografi buku teks Sejarah Nasional Indonesia diantaranya nasionalisme dan militerisme.

Kata kunci : Historiografi, Buku teks, Nasionalisme, Militerisme

PENDAHULUAN

Historiografi buku teks pelajaran sejarah adalah rekonstruksi materi sejarah yang disusun pada buku mata pelajaran sejarah dalam bentuk uraian narasi yang dijadikan rujukan materi dalam mata pelajaran sejarah. Pengertian historiografi dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah lebih merupakan sebagai metode daripada sebagai sejarah penulisan sejarah. Dalam pengertian metode, historiografi merupakan langkah dalam penelitian sejarah dengan cara melakukan

penafsiran, penjelasan dan penyajian (Sjamsuddin, 2007 : 155-271).

Penulisan sejarah pada buku teks pelajaran ditujukan untuk kepentingan pendidikan. Sejarah sebagai alat pendidikan akan dipengaruhi oleh landasan ideologi pendidikan yang dianut oleh negara tersebut. Landasan ideologi ketika dijadikan dasar dalam penulisan buku teks sejarah akan terjadi interpretasi oleh pembuat kebijakan pendidikan, dalam hal ini adalah pemerintah. Dengan demikian ideologisasi pada historiografi buku teks pelajaran sejarah bersifat politik.

Buku teks adalah buku yang dibu-

at sebagai pegangan yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran siswa dan disusun dengan memperhatikan perkembangan usia atau jenjang pendidikan siswa (Sjamsuddin, 2007 : 195). Dalam kaitan dengan pelajaran sejarah, maka buku teks adalah untuk kepentingan pendidikan sejarah. Dengan demikian, historiografi dalam buku teks pelajaran sejarah adalah rekonstruksi narasi sejarah yang dijadikan alat dalam pendidikan. Ketika sejarah ditempatkan dalam ranah pendidikan maka akan terjadi interpretasi subjektif sejarah bagi kepentingan pendidikan (Mulyana, 2012: vi). Interpretasi subjektif ini terjadi karena materi dan interpretasi terhadap fakta sejarah bersumber dari kurikulum sebagai produk kebijakan politik pemerintah dalam pendidikan (Hasan, 2012 : 118).

Hal yang menjadi masalah dalam penulisan buku teks pelajaran sejarah adalah adanya dua tuntutan yang satu sama lainnya bisa saling bertentangan. Tuntutan tersebut pertama buku teks sebagai karya historiografi menuntut adanya objektivitas dengan berdasar pada kaidah-kaidah kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam kaidah ilmu pengetahuan dikatakan bahwa ilmu memiliki stuktur umum yang berpijak dari landasan *epistemology, ontology* dan *semantic* (Llyod, 1986: ix). Metodologi menjadi penting sebagai dasar dalam historiografi sebagai produk dari penelitian sejarah. Metodologi sejarah sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan sehingga melahirkan suatu penulisan sejarah baru misalnya dengan pendekatan struktur (Burke, 1995 : 2-6). Salah satu pendekatan penting dalam pendekatan struktur ada dalam sejarah social yaitu sejarah yang menjelaskan struktur nyata yang ada di masyarakat (Lloyd, 1993 : 47).

Historiografi dapat dipahami pula sebagai bentuk wacana yaitu teks jika dilihat pada pendekatan yang *postmodernism*. Dalam historiografi terdapat narasi berupa bahasa yang terdiri dari hubungan antar kalimat dan memiliki makna. Makna tersebut merupakan suatu kebenaran (McCullagh, 1998 : 14-15). Makna tersebut dapat berupa interpretasi dari seorang sejarawan yang dipengaruhi oleh sikap, asumsi mentalitas dan nilai-nilai yang dimilikinya (Marwick, 1989 : 212).

Tuntutan kedua pada buku teks pelajaran adalah alat untuk pendidikan sejarah memiliki misi yang bersifat ideologis. Dengan adanya misi ini maka akan terjadi subjektivitas karena adanya interpretasi sepihak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan produk kebijakan politik. Rencana besar pemerintah tentang pendidikan ada dalam kurikulum, sedangkan kurikulum memiliki landasan politik (Hasan, 1996: 45). Salah satu aspek penting dalam pembelajaran sejarah adalah penanaman nilai. Nilai tersebut bisa bersifat politis, suatu nilai yang membantu perpolitikan dalam negeri (Kochar, 2008 : 61).

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana ideologisasi yang memberikan warna pada penulisan buku teks. Ideologisasi yang dimaksud adalah misi-misi bersifat ideologis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan konsep nasionalisme dan militerisme sebagai bentuk ideologisasi yang dipakai oleh pemerintah dalam narasi buku teks pelajaran sejarah di SMA. Peneliti akan mencoba pada mengkaji bagian-bagian mana pada buku teks pelajaran Sejarah Nasional Indonesia SMA yang mengandung ideologisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi adalah suatu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasi sejarah yang tertuang dalam buku teks pelajaran Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA. Dengan demikian, sumber data penelitian ini adalah buku teks pelajaran Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA jilid 1, Jilid 2 dan Jilid 3 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Alasan buku tersebut menjadi sumber data, karena buku tersebut merupakan buku yang resmi atau "*official history*" (Hasan, 2012: 29) yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga misi pemerintah dalam interpretasi narasi sejarah tersebut diharapkan nampak dan mudah dianalisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam metode analisis isi ini, penulis mencoba memberikan pemaknaan terhadap narasi pada buku teks SNI tersebut. Pemaknaan yang dilakukan dengan menggunakan dua konsep yaitu nasionalisme dan militerisme. Peneliti menganggap kedua konsep ini mengandung ideologisasi dalam memberikan pemaknaan terhadap peristiwa sejarah yang dinarasikan pada buku pelajaran sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Nasionalisme

Penulisan buku sejarah nasional memiliki keterkaitan dengan pandangan nasionalisme. Pandangan ini sudah menjadi isu penting sejak awal kemerdekaan ketika akan menyusun se-

jarah Indonesia yang *indonesiasentris*. Isu ini menjadi agenda penting dalam Seminar Sejarah Nasional I yang diselenggarakan pada 14-16 Desember 1957 di Yogyakarta. Mohammad Yamin sebagai salah satu pemakalah penting pada seminar tersebut menyatakan perlu adanya penyusunan filsafat sejarah nasional yang akan dijadikan pegangan dalam penyusunan sejarah nasional yang akan digunakan dalam pengajaran sejarah (Soejatmoko, 1995 : 203-204)

Munculnya rasa kebangsaan yang menjiwai terhadap penulisan sejarah karena bangsa Indonesia pada saat itu baru merdeka ingin melepaskan diri dari pengaruh penjajah. Pengaruh penjajah dalam penulisan sejarah saat itu masih berbau *neerlandosentris* masih berbau ke-Belanda-an. Bentuk penulisan sejarah yang *indonesiasentris* merupakan bentuk dari dekolonisasi terhadap historiografi Indonesia (Kartodirdjo, 1982: 29).

Nasionalisme lahir dalam historiografi Indonesia karena dalam historiografi terjadi persandingan antara kolonialisme dan nasionalisme. Dalam konteks kolonialisme, penulisan sejarah Indonesia pada awalnya bercorak *neerlandosentris* atau Belanda (penjajah), dan ini tidak sesuai dengan semangat proklamasi bagi Indonesia yang baru merdeka. Oleh sebab itu, perlu adanya penulisan sejarah dengan corak yang *indonesiasentris*. Wujud dari cita-cita tersebut yaitu dengan terbitnya buku standar sejarah Indonesia atau yang dikenal dengan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 6 jilid. SNI lahir sebagai realisasi dari rekomendasi Seminar Sejarah Nasional II tahun 1970. Buku SNI kemudian dijadikan bahan bagi penyusunan buku pelajaran sejarah mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Berdasarkan buku ini lah kemudian pada jenjang SMP dan di SMA disusun buku

teks Sejarah Nasional Indonesia atau yang dikenal buku paket.

Unsur-unsur nasionalisme sebagai suatu ideologi cukup mewarnai terhadap struktur penulisan buku teks SNI untuk SLTA. Istilah nasionalisme kita dapat merujuk ke beberapa pengertian para ahli. Ernest Renan menyatakan bahwa unsur utama dalam nasionalisme adalah *le desir de'être ensemble* (kemauan untuk bersatu) (http://id.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan/19-11-2012). Unsur utama yang member semangat untuk bersatu itu adalah nasionalisme. Ben Anderson menyatakan bahwa bangsa atau nasion adalah komunitas politik dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang terbayang, para anggotanya tidak pernah bertemu langsung secara tatap muka tetapi dalam benak mereka merasa menjadi anggota bangsa dan hidup dalam bayangan mereka tentang kebersamaan dalam hidup (Anderson, 2002 : 8).

Nasionalisme merupakan suatu konsep politik. Jika kita kaitkan konsep politik dengan pendekatan penulisan buku teks SNI untuk SMA, maka periodisasi yang digunakan lebih menggunakan pendekatan politik. Pendekatan politik yang dimaksud adalah penulisan sejarah mendekati pada jenis sejarah politik. Ciri utama dalam sejarah politik adalah studi tentang organisasi dan aktivitas kekuasaan pada masyarakat di masa lalu (Gardiner, 1988: 21). Salah satu bentuk dari organisasi kekuasaan itu adalah kerajaan.

Struktur penulisan buku teks SNI mencerminkan model penulisan sejarah politik. Hal dapat kita lihat dalam hal periodisasi yang digunakan dan uraian materinya. Pada jilid 1 mulai dari Bab V hingga Bab VIII membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu Budha, dengan rincian meliputi Bab V: Kerajaan-

Kerajaan Tertua; Bab VI: Sriwijaya, Mataram dan Kadiri; Bab VII: Sunda dan Bali; dan Bab VIII : Kerajaan Singhasari dan Majapahit (Notosusanto, 1981). Uraian tentang kerajaan-kerajaan pada masing-masing bab tersebut lebih banyak membicarakan tentang raja dan kehidupannya serta bagaimana raja itu memerintah.

Uraian tentang kerajaan pun nampak pada pembahasan buku jilid 2. Pada jilid ini pembahasan materi dibagi dalam dua periode sejarah Indonesia yaitu zaman kerajaan-kerajaan Islam dan zaman penjajahan bangsa Barat. Pembahasan tentang kerajaan ada pada Bab II dengan judul Sistem Pemerintahan dan Struktur Masyarakat. Pembahasan tentang sistem pemerintahan meliputi Kerajaan Mataram Islam abad ke-17-18, Kerajaan Banjar, Kerajaan Aceh dan Kerajaan Gowa (Notosusanto, 1980). Uraian tentang kerajaan-kerajaan Islam ini tidak semua kerajaan-kerajaan Islam yang ada saat itu, akan tetapi setidaknya mewakili wilayah geografis Indonesia yang meliputi wilayah bagian barat (Aceh dan Mataram), wilayah tengah (Kerajaan Banjar), dan wilayah timur (Kerajaan Gowa).

Pembahasan tentang kerajaan-kerajaan di nusantara memberikan suatu tafsiran dalam sejarah Indonesia bahwa sebelum terbentuknya Negara Bangsa (*Nation State*) yaitu Republik Indonesia pada tahun 1945, di Indonesia telah terdapat lembaga kekuasaan yang berdaulat penuh yaitu kerajaan. Bahkan kerajaan-kerajaan tersebut diuraikan sebagai kerajaan yang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh unsur luar yaitu Hindu Budha oleh unsur India dan Islam oleh unsur Arab. Gambaran unsur keaslian Indonesia pada Kerajaan Hindu Budha seperti diuraikan pada narasi berikut.

Dalam hal pemerintahan dan kemasyarakatan, sifat-sifat Indonesia

tetap bertahan. Hal ini nampak jelas dalam prasasti-prasasti. Raja tidak pernah memerintah Negara dengan kekuasaan tunggal dan mutlak seperti halnya di India. Kerajaan terdiri dari daerah-daerah yang diperintah oleh para "rakai" atau "rakyai". Mereka ialah penguasa-penguasa daerah yang mempunyai otonomi yang cukup luas. Umumnya mereka mempunyai hubungan keluarga dengan raja. Tetapi hal ini tidak perlu berarti bahwa mereka berasal dari satu keturunan. Hubungan tadi dapat juga disebabkan oleh perkawinan (Nugroho Notosusanto, 1981 : 55).

Keberadaan kerajaan-kerajaan merupakan kesatuan-kesatuan politik yang berdiri sendiri serta berdaulat. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki aktivitas sebagaimana umumnya sebuah kerajaan, dengan aktivitas yang bebas dan memiliki hubungan yang membentuk suatu jaringan. Jaringan ini terbentuk disebabkan oleh adanya komunikasi yang saat itu dikenal melalui transportasi laut dengan melakukan aktivitas pelayaran dan perdagangan. Aktivitas pelayaran dan perdagangan telah membentuk wilayah Nusantara sebagai bagian dari jaringan niaga bahkan termasuk salah satu jaringan perdagangan dunia yang ramai. Kerajaan-kerajaan di Nusantara menjadi pusat-pusat dagang yang ramai (Reid, 1992 : 10).

Pemahaman terhadap sejarah jaringan pelayaran dan perdagangan di Nusantara memiliki kunci penting dalam memahami sejarah Indonesia sebagai sebuah kesatuan negara yang kemudian terbentuk. Jaringan komunikasi yang berkembang di nusantara melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan telah membentuk integrasi. Integrasi ini merupakan konsep kunci dalam konsep kesatuan yang menjadi mitos dalam sejarah Indonesia (Kartodirdjo, 1988: xv-xvi).

Mitos yang dibangun sebagai

wujud dari proses terbentuknya Negara Indonesia sebagai Negara bangsa dengan memberikan penafsiran bahwa konsep Indonesia sebagai kesatuan wilayah dan ideologis telah ada. Misalnya uraian tentang alasan Krtanagara raja Singhasari mengirimkan ekspedisinya ke Malaya yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu.

Tujuan lain dari ekspedisi Malayu ini sebenarnya merupakan pelaksanaan politik luar negeri Singhasari untuk menghadapi ekspedisi Mongol. Pada waktu itu tentara Mongol di bawah pimpinan kaisar Kubhilai Khan sedang giat melakukan perluasan daerah kekuasaannya di Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui Malayu letaknya di jalan perdagangan antara India, Cina dan Indonesia. Mengingat letaknya yang sangat baik ini, Krtanagara mengirimkan tentaranya ke Malayu untuk menjalin persahabatan dengan Malayu. Sehingga dengan demikian terbentuklah benteng pertahanan dalam menghadapi tentara Mongol ke daerah Asia Tenggara (Notosusanto, 1981 : 126).

Uraian materi tersebut memberikan penafsiran seolah-olah Kerajaan Singhasari dengan rajanya Krtanagara adalah bangsa Indonesia yang menjadi bagian dari kawasan Asia Tenggara dan dia melawan kekuatan luar Kerajaan Mongol. Padahal Indonesia sebagai Negara bangsa baru ada pada tahun 1945 ketika Proklamasi dikumandangkan.

Pembentukan *nation state* (Negara Bangsa) baru terbentuk pada tahun 1945 melalui suatu proses yang perjuangan yang panjang dalam menghadapi penjajah dan berhasil diproklamasikan kemerdekaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Gerakan nasionalisme bangsa Indonesia telah melahirkan suatu kedaulatan politik me-

lalui berdirinya suatu Negara baru. Negara yang lahir ini merupakan hasil dari satu kesepakatan bersama dari pelbagai etnis, yang semula masing-masing etnis memiliki lembaga kedaulatan dalam bentuk kerajaan. Hal ini sesuai dengan salah satu teori tentang nasionalisme bahwa nasionalisme dapat terbentuk pula dengan berawal dari sentimen etnis yang kemudian berkembang meluas dalam kesatuan antar etnis yang membentuk sentiment rasa kebangsaan dari masyarakatnya (Hylland Eriksen, 1993 : 99).

Kesepakatan tentang bagaimana membangun negara bangsa ini sudah muncul sejak awal abad ke-20 ketika munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi ini dimotori oleh para kaum elite atau kaum terpelajar yang mendapatkan pendidikan dari Barat. Dengan demikian nasionalisme yang ada di Indonesia tidak lepas dari pengaruh westernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui pendidikan terhadap kaum pribumi (W.F. Wertheim, 1956 : 270).

Gerakan nasionalisme Indonesia dalam uraian historiografi buku teks pelajaran sejarah di SMA menunjukkan adanya suatu kontinuitas sejarah. Nasionalisme menjadi suatu ideologi penggerak dalam sejarah Indonesia terutama sejak ideologi menjadi suatu gagasan di awal abad ke-20 sampai dengan upaya mempertahankan kemerdekaan. Kontinuitas itu nampak tokoh-tokoh yang terlibat mulai dari awal gagasan nasionalisme diperkenalkan, kemudian ketika lahirnya proklamasi kemerdekaan hingga periode revolusi. Umumnya tokoh-tokoh nasionalis ini lah yang menjadi penggerak sejarah Indonesia hingga periode revolusi.

Narasi Militerisme

Militerisme dalam pengertian tulisan ini adalah bagaimana ideologi militer memberikan warna pada historiografi buku teks pelajaran Sejarah Nasional Indonesia untuk SLTA. Pengaruh militerisme dalam penulisan buku teks SNI untuk SLTA, tidak lepas dari ideologi kekuasaan yang mendominasi pemerintahan pada masa Orde Baru. Lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak lepas dari pengaruh militer yang berhasil menumpas PKI. Pemerintahan Orde Baru merupakan representasi kekuatan militer secara politik masuk dalam ranah kekuasaan.

Pengaruh ideologi militer dalam historiografi buku teks SNI untuk SLTA akan berpengaruh terhadap struktur penulisan dalam pembahasan materi. Struktur tulisan dan uraian pembahasan materi, akan menunjukkan pada jenis sejarah militer. Ciri penting penulisan sejarah militer adalah sejarah kekuatan tentara dan sejarah perang serta pertempuran (Gardiner, 1988 : 4-6).

Sejarah Nasional Indonesia khususnya mulai periode penjajahan hingga jaman setelah kemerdekaan merupakan sejarah perjuangan. Perjuangan yang dimaksud adalah bagaimana bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan hingga tercapainya kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Untuk melawan penjajahan, mencapai dan mempertahankan kemerdekaan banyak dilakukan dengan perjuangan bersenjata bahkan peperangan.

Uraian tentang peperangan dibahas pada Bab IV jilid 2 dengan judul Perlawanan Terhadap Kolonialisme. Perang dalam melawan kolonialisme dilakukan mulai oleh pihak kerajaan dan rakyat biasa. Ada peperangan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama seperti Perang Paderi (1821-1837),

Perang Aceh (1873-1904), Perang Diponegoro (1825-1830), dan sebagainya. Perang-perang tersebut dalam buku teks SNI diberi nama Perlawanan Besar (Notosusanto, 1980: 142). Selain pada zaman Belanda, perlawanan pun dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Beberapa perlawanan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang misalnya misalnya perlawanan Teuku Abdul Jalil di Aceh, KH Zainal Mustofa di Singaparna Tasiklamaya, dan Pemberontakan Peta di Blitar.

Gambaran tentang perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia baik terhadap penjajah Belanda maupun Jepang selalu digambarkan bahwa rakyat Indonesia berada pada pihak yang benar menentang penjajahan dan sebaliknya penjajahan berada pada pihak yang salah. Sejarah selalu digambarkan dengan gambaran interpretasi yang normatif dan hitam putih. Interpretasi sejarah ditarik pada nilai-nilai yang dianggap benar dalam persepektif perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut misalnya keberanian, rela pengorbanan, cinta tanah air, berani mati, dan sebagainya.

Pada umumnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui perlawanan bersenjata berakhir dengan kekalahan atau dapat ditumpas oleh penjajah baik jaman penjajahan Belanda maupun Jepang. Akan tetapi dalam uraian buku itu selalu digambarkan bagaimana semangat berjuang bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan melalui perlawanan bersenjata. Berikut ini contoh uraian heroismenya perlawanan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah Belanda.

Benteng-benteng pertahanan kaum Padri dibangun di berbagai tempat dan diperkuat dengan pasukan-pasukan yang banyak jumlahnya.

Benteng-benteng pertahanannya, antara lain, Bonio, di daerah Agam, Bonjol, dan di beberapa tempat lainnya. Pertempuran-pertempuran secara berturut-turut berlangsung dari tahun 1821 sampai tahun 1825. Seringkali Belanda menggunakan taktik membu-juk pemimpin-pemimpin Padri supaya mau berunding, tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Selama itu boleh dikata perlawanan berkobar di berbagai tempat (Notosusanto, 1980: 149).

Uraian di atas mencerminkan betapa Perang Padri merupakan perang melawan kolonialisme dalam skala yang besar. Para pejuang Padri tidak mudah dirayu oleh Belanda, mereka para pejuang yang memiliki prinsip dan tidak mau berkhianat. Lebih baik berperang daripada berunding. Ajakan berunding Belanda dianggap hanya taktik Belanda saja untuk mengalahkan kaum Padri.

Perang yang besar pun terjadi di Pulau Jawa yang dikenal dengan Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830). Walaupun Perang ini berakhir dengan kekalahan di pihak Diponegoro, tetapi uraian berlangsungnya perang menunjukkan betapa besarnya perlawanan yang dilakukan dan dalam periode tertentu peperangan dimenangkan oleh pihak Diponegoro. Sebagaimana uraian di bawah.

Pada tahun-tahun pertama, pertempuran meluas sampai ke daerah Pacitan dan Purwodadi, dan dalam waktu berikutnya meluas sampai ke daerah Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang dan Madiun. Di daerah Kertosono pertempuran dipimpin oleh Bupati Kertosono, dan di daerah Banyumas dipimpin oleh Pangeran Suriatmojo. Di daerah Madiun perlawanan dilakukan di bawah pimpinan Bupati Kertodirjo, dan Pangeran Serang. Di daerah Plered Pasukan Diponegoro dipimpin oleh Kertopengalasan yang memiliki kemampu-

an yang cukup kuat. Pada tahun 1826 serangan-serangan yang dilancarkan oleh pihak Belanda terhadap pasukan Diponegoro yang ada di Plered berhasil dapat ditangkis. Sementara itu di daerah lain pertempuran-pertempuran banyak dilakukan oleh pasukan Alibasah Sentot Prawiradirdjo, yaitu salah seorang panglima yang terkemuka dalam tentara Diponegoro. Berkali-kali pasukan Sentot berhasil memukul pasukan Belanda (Notosusanto, 1980 : 153-154).

Interpretasi historiografi yang bersifat militer pada masa penjajahan digunakan istilah “perlawanan” terhadap penjajah. Sedangkan pada masa setelah kemerdekaan diberikan istilah Perang Kemerdekaan sebagaimana dibahas dalam satu bab khusus pada jilid 3. Pembahasan tentang perang kemerdekaan tidak semua membahas perang. Pembahasan tentang perang hanya dibahas pada subbab Diplomasi dan Konfrontasi dan Gerilya.

Penulisan sejarah tentang militer pada masa awal kemerdekaan dan masa sesudahnya lebih banyak membahas tentang upaya menghadapi ancaman dari luar yaitu Belanda melalui Agresi Militer I dan II yang ingin kembali menjajah dan menghadapi berbagai pemberontakan dalam negeri seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Westerling, PKI Madiun, DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Soumokil, dan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, DI/TII di Aceh dibawah pimpinan Teungku Daud Beureueh. Semua ancaman tersebut ditanggulangi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Uraian tentang peran militer cukup banyak dalam masa menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar sehingga betapa pentingnya militer dalam sejarah Indonesia. Berdirinya TNI

merupakan akibat dari adanya ancaman-ancaman keamanan negara. Tentang pentingnya peran TNI di Indonesia sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pertempuran bersenjata yang terjadi di seluruh Indonesia menyadarkan pemerintah bahwa adanya suatu tentara nasional mutlak perlu. Karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) (Notosusanto, 1992 : 138).

Keberadaan tentara dalam historiografi buku teks SNI ditafsirkan sebagai penjaga kewanitaan karenanya banyaknya gangguan-gangguan keamanan. Pemberontakan-pemberontakan dan gerakan-gerakan yang timbul saat itu dianggap mengganggu kewanitaan dalam negeri dan akan merongrong stabilitas negara bahkan sampai ditafsirkan akan merongrong ideologi negara Pancasila, seperti pemberontakan PKI dan DI/TII. Peran tentara dalam menghadapi pemberontakan dan gerakan-gerakan dalam buku teks tersebut diberi judul “Menanggulangi Kewanitaan Dalam Negeri”. Gejala mengenai timbulnya pihak yang akan merongrong negara sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Kabinet RIS di bawah pimpinan Perdana Menteri Drs. Moh Hatta menghadapi rongrongan bukan saja bersifat politis, tetapi juga bersifat militer. Tentu saja hal ini mengancam kewanitaan dan integritas nasional. Gejala ini sudah terlihat sejak pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) (Notosusanto' 1992 : 184).

Peran tentara dalam historiografi buku teks SNI ditafsirkan tidak hanya sebagai penjaga kewanitaan, tetapi juga sebagai penjaga ideologi negara Pancasila. Peran ini terutama digambarkan ketika menghadapi pemberontakan DI/TII, sebagaimana diuraikan di bawah

ini :

Gangguan Keamanan lainnya pada masa RIS ini datang dari "DI/TII" yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat. Persoalan "DI/TII" merupakan masalah politik dan militer, yang ditimbulkan oleh golongan ekstrim yang ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ingin bentuk negara Islam (Notosusanto, 1992 : 187).

Peran militer dalam upaya mem-bela ideologi Pancasila puncaknya diuraikan pada materi dengan subbab dengan judul "Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI". Peristiwa ini ditafsirkan sebagai gerakan yang dilakukan oleh PKI dalam upaya mengganti ideologi Pancasila yang berakhir dengan terbunuhnya tujuh orang perwira TNI. Militer memiliki peran dalam upaya penumpasan terhadap gerakan 30 September/PKI sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam waktu yang singkat pengkhianatan yang dilakukan G30S/PKI berhasil dipatahkan, berkat kesetiaan rakyat dan ABRI terhadap Pancasila. Dengan melalui kudeta ini, jelaslah bahwa PKI berusaha merebut kekuasaan Negara untuk selanjutnya menggantikan Pancasila dengan Marxisme-Leninisme. Sukses kita menumpas pemberontakan G30S/PKI itu sekarang kita peringati setiap tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila (Notosusanto, 1992 : 220).

SIMPULAN

Buku teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA merupakan salah satu bentuk karya historiografi yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran di Sekolah. Sebagaimana lazimnya karya historiografi buku teks Sejarah Nasional harus mengikuti kai-

dah-kaidah ilmu sejarah, yaitu rekonstruksi atas sumber-sumber sejarah diinterpretasi secara objektif dan akademik. Interpretasi sejarah nasional sebagaimana yang digambarkan dalam buku teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA dipengaruhi oleh pemerintah. Hal terjadi karena materi yang diuraikan dalam buku teks merujuk pada kurikulum pendidikan yang digunakan. Kurikulum merupakan salah satu bagian dari kebijakan politik dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, pemilihan materi dan rekonstruksi sumber-sumber sejarah dalam bentuk interpretasinya akan dipengaruhi oleh faktor politik dari pemerintah. Bentuk pengaruh tersebut diantaranya adanya ideologisasi dengan ideologi nasionalisme dan militerisme. Ideologi nasionalisme akan nampak dari uraian tentang bagaimana asal usul dan perkembangan Indonesia sebagai negara bangsa. Sedangkan militerisme akan nampak dalam bentuk uraian bahwa sejarah nasional merupakan sejarah perjuangan baik sejak jaman penjajahan maupun setelah kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan sangat didominasi oleh peran militer dalam perjuangan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 2002. *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta : Insist-Pustaka Pelajar.
- Burke, Peter .1995. "Overture : The New History, its Past and its Future", dalam Peter Burke. ed. 1995. *New Perspective on Historical Writing*. Cambridge : Polity Press.
- Eriksen, Thomas Hylland .1993. *Etnicity & Nationalism Antropological Perspectives*. London : Pluto Press.
- Gardiner, Juliet. 1988. *What Is History Today ...?*. London : Macmillan Education.
- Hasan, S. Hamid. 2012. *Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dalam Ide dan Pembelajaran*

- ran. Bandung : Rizqi Press.
- . 1996. *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- .1988. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1*. Jakarta : Gramedia.
- Kochhar, S.K. 2008. *Pembelajaran Sejarah Teaching of History*. Jakarta : Gramedia.
- Lloyd, Christopher. 1986. *Explanation in Social History*, New York : Basil Blackwell.
- .1993. *The Structures of History*. London : Basil Blackwell
- Marwick, Athur.1989. *The Nature of History*. London : Macmillan.
- McCullagh, C. Behan.1998. *The Truth of History*. London : Routeledge.
- Mulyana, Agus. Ed." Pendidikan Sejarah Nilai dan Subjektivitas Interpretasi". dalam Hasan, S. Hamid. 2012. *Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dalam Ide dan Pembelajaran*. Bandung : Rizqi Press.
- Notosusanto, Nugroho. et. al. 1980. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1 Untuk SMA*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- .1981. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 Untuk SMA*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- .1992. *Sejarah Nasional Indonesia 3 Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Reid, Anthony. 1992. *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I : Tanah di Bawah Angin*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- . 2007."Penulisan Buku Teks Dan Sejarah Lokal". dalam, Mulyana, Agus & Gunawan, Restu. Ed. *Sejarah Lokal Penulisan dan Pembelajaran di Sekolah*. Bandung : Salmina Press.
- Soejatmoko. 1995. *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta : Gramedia.
- Wertheim, W.F. 1956. *Indonesian Society In Transition A Study of Social Change*. Bandung : Sumur Bandung.

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan (19-11-2012).